

DIMENSI KEBIJAKAN STRATEGIS TRANSFORMATIF PENDIDIKAN MADRASAH DAN PERGURUAN TINGGI ISLAM (Studi Fenomenologi Kebijakan Kementerian Agama Indonesia)

Received: Des 31th 2024

Revised: Jan 04th 2025

Accepted: Jan 07th 2025

M. Yusuf Aminuddin¹
yusufaminuddin@staisenorituban.ac.id

Abstract : This research aims to analyze the dimensions of transformative strategic policies in Islamic madrasah and higher education education, focusing on policies issued by the Ministry of Indonesia Religion. In the context of rapid social change and modernization, Islamic education faces complex challenges that require responsive and inclusive policies. Through a descriptive qualitative approach based on phenomenological studies, this research explores the experiences and perspectives of stakeholders in implementing education policies. The research results show that education policies must respond to diverse communities' needs, integrate local values, and create synergy between formal and non-formal education. In addition, improving the quality of human resources, active participation from the community, and innovation in the curriculum are the keys to achieving effective educational transformation. This research also emphasizes the importance of evaluation and monitoring in education policy to ensure sustainability and equal access to education. In this way, it is hoped that the resulting policies can contribute to the development of education that is not only academically competent but also forms strong character and moral values in the younger generation so that they can contribute positively to community development.

Keywords: Transformative Policy, Madrasah Education, Islamic Higher Education

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dimensi kebijakan strategis transformatif dalam pendidikan madrasah dan perguruan tinggi Islam, dengan fokus pada kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Indonesia. Dalam konteks perubahan sosial dan modernisasi yang cepat, pendidikan Islam menghadapi tantangan kompleks yang memerlukan kebijakan yang responsif dan inklusif. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi fenomenologi, penelitian ini menggali pengalaman dan perspektif para pemangku kepentingan dalam implementasi kebijakan pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang beragam, mengintegrasikan nilai-nilai lokal, serta menciptakan sinergi antara pendidikan formal dan non-formal. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia, partisipasi aktif dari masyarakat, dan inovasi dalam kurikulum menjadi kunci untuk mencapai transformasi pendidikan yang efektif. Penelitian ini juga menekankan pentingnya evaluasi dan monitoring dalam kebijakan pendidikan untuk memastikan keberlanjutan dan kesetaraan akses pendidikan. Dengan demikian, diharapkan kebijakan yang dihasilkan dapat berkontribusi pada pengembangan pendidikan yang tidak hanya kompeten secara akademis, tetapi juga membentuk karakter dan nilai-nilai moral yang kuat pada generasi muda, sehingga mampu berkontribusi positif terhadap pembangunan masyarakat.

Kata Kunci: Kebijakan Transformatif, Pendidikan Madrasah, Perguruan Tinggi Islam

¹ STAI Senori Tuban, Indonesia

PENDAHULUAN

Dinamika perubahan pendidikan menjadi salah satu pilar fundamental yang menentukan arah peradaban suatu bangsa. Di tengah arus modernisasi yang kian deras, pendidikan madrasah dan perguruan tinggi Islam menghadapi tantangan yang kompleks, baik dari segi substansi maupun metodologi. Kebijakan strategis yang transformatif menjadi suatu keharusan untuk menjawab tantangan tersebut, agar pendidikan Islam tidak hanya relevan, tetapi juga mampu berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan Masyarakat.² Transformasi pendidikan madrasah dan perguruan tinggi Islam tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial, budaya, dan politik yang melingkupinya. Kebijakan yang diambil harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang beragam, serta mempertimbangkan nilai-nilai lokal yang kental. Dalam hal ini, kebijakan strategis yang transformatif diharapkan dapat menciptakan sinergi antara pendidikan formal dan non-formal, sehingga menghasilkan lulusan yang tidak hanya kompeten secara akademis, tetapi juga memiliki karakter yang kuat.

Kebijakan adalah suatu ketetapan yang berisi prinsip-prinsip untuk mengarahkan tindakan yang direncanakan dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.³ Analisis kebijakan merupakan proses yang menghasilkan dan menyajikan informasi yang dapat menjadi dasar bagi para pembuat kebijakan dalam pengambilan keputusan.⁴ Proses ini juga dapat digunakan untuk meningkatkan penilaian di antara para pembuat kebijakan. Analisis kebijakan (*policy analysis*) berbeda dari pembuatan atau pengembangan kebijakan (*policy development*), karena analisis kebijakan tidak mencakup penyusunan proposal untuk kebijakan yang akan datang, melainkan lebih fokus pada evaluasi kebijakan yang sudah ada. Di sisi lain, pengembangan kebijakan berfokus pada proses penyusunan proposal untuk kebijakan baru.

Menurut Titmuss, kebijakan selalu berorientasi pada masalah dan tindakan.⁵ Dalam konteks pendidikan, kebijakan sekolah menjadi kunci dalam merumuskan tujuan umum dan spesifik, sehingga harus berfokus pada masalah yang dihadapi pendidikan, baik dari sisi internal maupun eksternal, disertai upaya perbaikan untuk meningkatkan kualitas layanan

² Toha Ma'sum, "Strategi Transformatif Membangun Pendidikan Berkualitas Berbasis Pesantren," *Jurnal El-Barqie: Jurnal MA Darussalam* 1, no. 1 (2020): 1–20.

³ Haris Munawar, "Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Agama Islam terhadap Koordinasi Penyuluhan dengan Pengawas Pendidikan Agama Islam untuk Mewujudkan Efektivitas Program Pendidikan Agama Islam," *Jurnal Pendidikan UNIGA* 11, no. 01 (2017): 21, <https://doi.org/10.52434/jp.v11i1.25>.

⁴ Rokim, "Analisis Kebijakan Versi Dunn & Implementasinya Dalam Pendidikan Islam.," *PANCAWAHANA: Jurnal Studi Islam* 14, no. 2 (2019): 61.

⁵ Himatul Aliyah, "Implementasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto Kementrian Agama Kota Kediri," *REVITALISASI* 11, no. 2 (31 Desember 2022): 182, <https://doi.org/10.32503/revitalisasi.v11i2.3198>.

sekolah. Baik analisis maupun pengembangan kebijakan sama-sama memperhatikan konsekuensi dari kebijakan yang ada. Analisis kebijakan meneliti kebijakan yang telah diterapkan, sedangkan pengembangan kebijakan memberikan panduan untuk merumuskan kebijakan baru.⁶

Kondisi pendidikan Islam yang kurang berdaya menjadi perhatian banyak pihak, mulai dari ahli pendidikan hingga orang tua. Pendidikan, terutama pendidikan agama, dianggap tidak cukup efektif dalam menyelesaikan masalah, bahkan sering kali menjadi bagian dari masalah itu sendiri. Oleh karena itu, muncul berbagai gagasan untuk melakukan reinterpretasi dan reorientasi, termasuk perubahan paradigma dalam praktik pendidikan. Perubahan ini mencakup penyelenggaraan pendidikan dengan pendekatan akademis, orientasi pada pengembangan karakter peserta didik yang aktif, serta pengelolaan pendidikan yang desentralistik dan inklusif.

Tantangan utama dalam kebijakan pendidikan Islam adalah bagaimana mengintegrasikan kurikulum yang relevan dengan perkembangan zaman, tanpa mengabaikan esensi ajaran Islam. Kebijakan yang transformatif harus mampu menjembatani antara tradisi dan inovasi, sehingga pendidikan madrasah dan perguruan tinggi Islam dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat. Dalam konteks ini, peran Kementerian Agama Islam sangat krusial dalam merumuskan kebijakan yang inklusif dan responsive. Kebijakan pendidikan yang diambil oleh Kementerian Agama Islam juga mencerminkan dinamika internal dan eksternal yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan.

Kebijakan strategis yang transformatif harus memperhatikan aspek keberlanjutan. Pendidikan tidak hanya sekadar transfer ilmu, tetapi juga merupakan proses pembentukan karakter dan nilai-nilai moral.⁷ Oleh karena itu, kebijakan yang diambil harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, serta mendorong partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Dalam hal ini, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan menjadi sangat penting. Pendidikan madrasah dan perguruan tinggi Islam juga harus mampu bersaing dengan institusi pendidikan lainnya. Kebijakan yang transformatif harus mencakup pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, serta peningkatan akses dan pemerataan pendidikan. Dengan demikian, lulusan pendidikan Islam tidak hanya memiliki

⁶ Nurul Fika, Anis Fauzi, dan Ahmad Qurtubi, “Analisis Kebijakan Versi William Dunn dalam Pondok Pesantren Modern,” *Journal on Education* 05, no. 04 (2023), <https://www.jonedu.org/index.php/joe/article/view/2861>.

⁷ Alprianti Pare dan Hotmaulina Sihotang, “Pendidikan Holistik untuk Mengembangkan Keterampilan Abad 21 dalam Menghadapi Tantangan Era Digital,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (2023).

kompetensi akademis, tetapi juga mampu berkontribusi dalam berbagai sektor kehidupan Masyarakat.⁸

Kementerian Agama Islam memiliki kontribusi yang signifikan dalam pengembangan kebijakan pendidikan Islam di Indonesia. Dengan memahami dimensi-dimensi kebijakan yang diambil oleh Kementerian Agama Islam, diharapkan dapat ditemukan langkah-langkah strategis yang lebih efektif dalam menghadapi tantangan pendidikan di era modern. Melalui pendekatan fenomenologi, diharapkan suara dan pengalaman para pemangku kepentingan dapat diakomodasi, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan harapan Masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Kebijakan Pendidikan

Secara umum, konsep dapat dipahami sebagai suatu abstraksi yang mencerminkan karakteristik umum dari sekelompok objek, peristiwa, atau fenomena lainnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsep didefinisikan sebagai gambaran mental mengenai objek, proses, atau hal lain yang ada di luar bahasa yang digunakan oleh akal untuk memahami berbagai hal.⁹ Sementara itu, dalam *Oxford Student's Dictionary of English*, konsep diartikan sebagai ide atau prinsip dasar. Dengan demikian, konsep dapat dipahami sebagai ide atau gambaran umum tentang suatu hal.

Kebijakan merupakan kumpulan konsep dan prinsip yang menjadi landasan dan pedoman dalam pelaksanaan suatu kegiatan, kepemimpinan, atau tindakan dalam konteks pemerintahan dan organisasi.¹⁰ Kebijakan dapat diartikan sebagai pernyataan cita-cita, tujuan, atau prinsip yang berfungsi sebagai panduan bagi manajemen dalam mencapai sasaran. Dalam *Oxford Student's Dictionary of English*, kebijakan didefinisikan sebagai rencana tindakan yang disepakati atau dipilih oleh pemerintah, perusahaan, dan sebagainya. Kebijakan ini bersifat tertulis dan merupakan keputusan formal dari suatu organisasi yang mengatur perilaku untuk menciptakan nilai baru dalam masyarakat. Kebijakan berfungsi sebagai acuan bagi anggota organisasi atau masyarakat dalam bertindak, dan umumnya bersifat proaktif serta berorientasi

⁸ Ahmad Mashudi, "Kebijakan PPDB Sistem Zonasi SMA/SMK dalam mendorong Pemerataan Kualitas Sumberdaya Manusia di Jawa Timur," *Nidhomul Haq : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4, no. 2 (5 Oktober 2019): 186–206, <https://doi.org/10.31538/ndh.v4i2.327>.

⁹ Suci Zakiah Dewi dan H Tatang Ibrahim, "Pentingnya Pemahaman Konsep Untuk Mengatasi Miskonsepsi Dalam Materi Belajar IPA di Sekolah Dasar," *Jurnal Pendidikan UNIGA* 13, no. 01 (2019): 130-136., <https://doi.org/10.52434/jp.v13i1.823>.

¹⁰ Dwiyanto Indiahono, *Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Gava Media, 2009), 34.

pada penyelesaian masalah.¹¹ Berbeda dengan hukum dan peraturan, kebijakan lebih bersifat adaptif dan interpretatif, meskipun tetap mengatur apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Kebijakan diharapkan dapat bersifat umum namun tetap mempertimbangkan karakteristik lokal yang spesifik, sehingga dapat diinterpretasikan sesuai dengan kondisi yang ada.

Kebijakan merupakan terjemahan dari istilah “policy” dalam bahasa Inggris, yang merujuk pada rencana kegiatan atau pernyataan tujuan yang diusulkan atau diadopsi oleh pemerintah, partai politik, dan entitas lainnya. Dengan demikian, kebijakan mencakup rencana, pernyataan tujuan, kontrak, dan dokumen tertulis yang dikeluarkan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, siapa pun dapat terlibat dalam suatu kebijakan. Istilah kebijakan juga digunakan untuk menggambarkan tindakan atau keputusan yang diambil oleh seorang aktor, baik itu pejabat, kelompok, atau lembaga pemerintahan. Dengan demikian, kebijakan merupakan keputusan yang diambil oleh pemimpin atau pihak berwenang dalam suatu Lembaga.

Dalam konteks pendidikan, kebijakan pendidikan dapat dipahami sebagai aturan tertulis yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur aspek-aspek yang berkaitan dengan pendidikan. Konsep kebijakan pendidikan adalah gambaran umum mengenai aturan-aturan tersebut yang bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan. Bentuk kebijakan meliputi: 1) Undang-Undang, 2) Peraturan Pemerintah, 3) Keppres, 4) Kepmen, 5) Perda, 6) Keputusan Bupati, dan 7) Keputusan Direktur.¹² Setiap contoh kebijakan tersebut bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh pihak yang menjadi objek kebijakan. Contoh-contoh ini juga menunjukkan bahwa ruang lingkup kebijakan dapat bersifat makro, meso, dan mikro.

Kebijakan dihasilkan melalui proses pembuatan kebijakan, yang melibatkan berbagai elemen dalam sistem sosial untuk menetapkan tujuan. Proses ini mempertimbangkan faktor-faktor eksternal, masukan, proses transformasi, keluaran, dan umpan balik dari lingkungan kepada pembuat kebijakan. Istilah kebijaksanaan merujuk pada kearifan individu, sedangkan kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan hasil keputusan formal dari suatu organisasi. Contoh-contoh kebijakan yang telah disebutkan sebelumnya menunjukkan bahwa kebijakan bersifat mengikat dan harus dilaksanakan oleh objek kebijakan, serta mencakup berbagai tingkat ruang lingkup.

¹¹ Abdul Rozak, “Kebijakan Pendidikan Di Indonesia,” *Alim / Journal of Islamic Education* 3, no. 2 (23 Juni 2021): 197208, <https://doi.org/10.51275/alim.v3i2.218>.

¹² Anggi Setia Lengkana dan N. Siti Nuraeni Sofa, “Kebijakan Pendidikan Jasmani dalam Pendidikan,” *Jurnal Olahraga* 3, no. 1 (30 April 2017): 1–12, <https://doi.org/10.37742/jo.v3i1.67>.

Ragam dan Bentuk Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan adalah bagian dari kebijakan publik yang berfokus pada sektor pendidikan.¹³ Kebijakan publik mencakup berbagai keputusan yang diambil oleh pemerintah, termasuk kebijakan di bidang ekonomi, hukum, agama, dan isu-isu lain yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi oleh warga negara. Oleh karena itu, ketika membahas kebijakan pendidikan, kita berbicara tentang kebijakan publik yang secara khusus ditujukan untuk sektor pendidikan, yang merupakan kombinasi dari istilah “policy” dan “education”. Secara esensial, kebijakan pendidikan terdiri dari keputusan yang mencakup tujuan, prinsip, dan aturan-aturan yang harus diikuti.¹⁴ Biasanya, format kebijakan ini dicatat dan ditulis agar dapat dijadikan pedoman bagi pimpinan, staf, dan anggota organisasi, serta untuk mengatur interaksi mereka dengan lingkungan eksternal. Bentuk nyata dari kebijakan pendidikan sering kali berupa undang-undang pendidikan, instruksi, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, peraturan menteri, dan dokumen lain yang berkaitan dengan pendidikan.

Menurut Divine dalam karya Munadi dan Barnawy, kebijakan pendidikan memiliki empat dimensi utama, yaitu:¹⁵

1. Dimensi Normatif, dimensi ini mencakup nilai-nilai, standar, dan filosofi yang mendorong masyarakat untuk melakukan peningkatan dan perubahan melalui kebijakan pendidikan yang ada.
2. Dimensi Struktural, dimensi ini berhubungan dengan ukuran pemerintahan, seperti desentralisasi, sentralisasi, federalisme, atau bentuk lainnya, serta mencakup struktur organisasi, metode, dan prosedur yang mendukung dan memperkuat kebijakan pendidikan.
3. Dimensi Konstituenstif, dimensi ini terdiri dari individu, kelompok kepentingan, dan penerima kebijakan yang menggunakan pengaruh mereka untuk memengaruhi proses pembuatan kebijakan.
4. Dimensi Teknis, imensi ini mencakup pengembangan, praktik, implementasi, dan evaluasi dalam pembuatan kebijakan pendidikan.

Beragam kebijakan pendidikan mencerminkan tingkat di mana kebijakan tersebut dirumuskan dan dilaksanakan, serta mencakup cakupan pelaksanaan dan pihak-pihak yang terlibat. Terdapat empat jenis kebijakan, yaitu:

¹³ Aminuddin Bakry, “Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik,” *Jurnal Medtek* 2, no. 1 (2010).

¹⁴ Ninik Hidayati dan Dian Rustyawati, “Kepala Sekolah Sebagai Penentu Kebijakan Pendidikan di Sekolah Dasar,” *Premiere : Journal of Islamic Elementary Education* 1, no. 2 (25 Juni 2020): 91–103, <https://doi.org/10.51675/jp.v1i2.82>.

¹⁵ Barnoto, “Implementasi Kebijakan Program Akselerasi di Madrasah Aliyah Unggulan Amanatul Ummah Pacet Mojokerto,” *JOIES (Journal of Islamic Education Studies* 1, no. 2 (2016), <https://doi.org/10.15642/joies.2016.1.2.221-246>.

1. Kebijakan Nasional (*National Policy*), Kebijakan ini ditentukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan dikenal sebagai kebijakan administratif yang berada pada tingkat nasional.
2. Kebijakan Umum (*General Policy*), Juga dikenal sebagai kebijakan eksekutif, kebijakan ini ditentukan oleh individu yang menduduki posisi eksekutif. Kebijakan eksekutif mencakup: a) Undang-undang, yang pembuatannya berada di tangan presiden dengan persetujuan DPR. b) Peraturan pemerintah, yang dibuat untuk melaksanakan undang-undang dan juga ditetapkan oleh presiden. c) Keputusan dan instruksi presiden, yang berisi kebijakan umum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan ditetapkan oleh presiden.
3. Kebijakan Khusus (*Special Policy*), Kebijakan ini ditentukan oleh Menteri, yang merupakan pembantu presiden dalam kapasitas eksekutif. Kebijakan khusus ini dibuat oleh Menteri berdasarkan kebijakan yang lebih tinggi.
4. Kebijakan Teknis (*Technical Policy*), Dikenal sebagai kebijakan operatif, kebijakan ini berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan. Penentuan kebijakan ini berada pada eselon 2 ke bawah, seperti Direktorat Jenderal atau pimpinan lembaga non-departemen. Produk dari kebijakan ini dapat berupa peraturan, keputusan, dan instruksi dari pimpinan lembaga. Pada tingkat kebijakan teknis ini, Gubernur, Kepala Kantor Wilayah, Bupati, dan Kepala Dinas di masing-masing bidang melaksanakan kebijakan sesuai dengan kondisi dan situasi daerah mereka. Dengan kata lain, faktor-faktor kondisional dan situasional daerah, seperti budaya, ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan, sosial, serta sumber daya yang tersedia, dapat memengaruhi cara penerapan kebijakan yang berasal dari instansi yang lebih tinggi.

Secara umum, di Indonesia terdapat dua jenis kebijakan pendidikan, yaitu kebijakan sentralistik dan desentralistik. Kebijakan desentralistik diambil untuk menyesuaikan dengan kondisi masing-masing satuan pendidikan yang berbeda. Salah satu contohnya adalah Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Kebijakan ini memiliki empat dampak positif yang dapat diidentifikasi, yaitu: 1) peningkatan mutu, 2) efisiensi keuangan, 3) efisiensi administrasi, dan 4) perluasan serta pemerataan.

Pendidikan Islam Transformatif

Pendidikan Islam memiliki kekayaan dan kesempurnaan yang signifikan, karena bertujuan untuk membentuk individu Muslim yang ideal dan mencapai kebahagiaan di dunia serta akhirat, meskipun cenderung bersifat normatif. Dalam praktiknya, pendidikan Islam sering kali bersifat idealis dan kurang terhubung dengan masalah-masalah empiris yang nyata.

Hal ini disebabkan oleh pandangan bahwa semua aktivitas umat Islam, termasuk pendidikan, harus berlandaskan wahyu Tuhan secara harfiah, sehingga kurang memperhatikan aspek realitas yang empiris.

Konsep pendidikan Islam cenderung idealis dan kurang relevan dengan kondisi nyata. Nabi Muhammad sebagai teladan dalam pendidikan Islam terlibat langsung dalam menyelesaikan masalah-masalah di masyarakat. Jika paradigma pendidikan kritis diterima dengan beberapa penyesuaian, maka langkah selanjutnya yang perlu dipikirkan adalah implementasi praktis, mulai dari perumusan orientasi pendidikan Islam, pembaruan kurikulum, pengembangan sumber daya manusia, diversifikasi strategi pembelajaran, perubahan model evaluasi, evaluasi kebijakan, hingga perubahan manajemen di lembaga pendidikan dari tingkat dasar hingga pendidikan tinggi.

Kurikulum dalam pendidikan Islam yang kritis harus mengintegrasikan teks dan konteks secara dinamis. Paradigma pembelajaran kontekstual perlu diterapkan, di mana setiap materi yang diajarkan harus relevan dengan masalah dan konteks kehidupan sehari-hari peserta didik.¹⁶ Misalnya, saat membahas isu kerusakan lingkungan, harus ada dialog antara teks al-Qur'an dan masalah lingkungan yang dihadapi di sekitar sekolah. Jika sekolah berada di Kalimantan, maka isu seperti penebangan liar atau kebakaran hutan harus diangkat. Di Riau, misalnya, isu-isu tersebut sangat relevan untuk dibahas. Oleh karena itu, kurikulum harus lebih banyak memasukkan masalah dan kearifan local.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif berbasis studi fenomenologi, dengan menggunakan jenis penelitian ini tema yang dibahas akan menghasilkan hasil penelitian yang mendalam. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang tidak hanya fokus pada teori saja, akan tetapi juga memperhatikan aspek lapangan dengan berdasarkan bukti nyata. Sedangkan penelitian deskriptif memberikan gambaran penyajian data dalam bentuk laporan.¹⁷ Pendekatan fenomenologi ini dideskripsikan sebagai pendekatan filosofis yang menyelidiki pengalaman manusia, fenomenologi bermakna metode pemikiran dalam memperoleh ilmu pengetahuan yang terbarukan atau dengan menggembangkan pengetahuan yang ada dengan langkah-langkah yang logis, sistematis kritis, tidak berdasarkan

¹⁶ Dewi Shara Dalimunthe, "Transformasi Pendidikan Agama Islam: Memperkuat Nilai-nilai Spiritual, Etika, dan Pemahaman Keislaman dalam Konteks Modern," *Al-Murabbi: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 1 (14 Juni 2023): 75–96, <https://doi.org/10.62086/al-murabbi.v1i1.426>.

¹⁷ Siti Fatimah dan Irma Rosyidah, "Implementasi Supervisi Akademik Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di MTs Sa Miftahul Hikmah Parengan Tuban," *SCAFFOLDING: Jurnal Pendidikan Islam dan Multikulturalisme* 3, no. 1 (29 Juni 2021): 66–75, <https://doi.org/10.37680/scaffolding.v3i1.872>.

apriori/prasangka dan tidak dogmatis.¹⁸ Fenomenologi ini juga berfokus pada suatu yang dialami baik dalam kesadaran individu yang disebut dengan intensionalitas. Intensionalitas ini menggambarkan hubungan antara proses yang terjadi dalam kesadaran dengan objek yang menjadi perhatian proses itu sendiri.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen terkait kebijakan pendidikan. Wawancara mendalam dilakukan dengan berbagai informan kunci, termasuk pengambil kebijakan, pendidik, dan mahasiswa, untuk mendapatkan perspektif yang beragam mengenai implementasi kebijakan. Observasi dilakukan di lingkungan madrasah dan perguruan tinggi untuk memahami praktik pendidikan yang berlangsung. Selain itu, analisis dokumen kebijakan juga dilakukan untuk mengidentifikasi tujuan, strategi, dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan Pendidikan. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif berbasis fenomenologi, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman tentang dimensi kebijakan strategis transformatif dalam pendidikan madrasah dan perguruan tinggi Islam. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi pengembangan kebijakan pendidikan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pendidikan Nasional dan Transformasi sosial

Berdasarkan analisis yang dilakukan, sistem pendidikan di Indonesia saat ini masih jauh dari kategori pendidikan yang kritis. Dalam beberapa aspek, pendidikan kita terjebak dalam paradigma konservatif, meskipun secara umum pendidikan nasional cenderung mengadopsi pendekatan liberal. Hal ini terlihat dari adanya privatisasi pendidikan, model hubungan subjek-objek, serta orientasi yang sangat dipengaruhi oleh ideologi kapitalisme. Di tengah gelombang globalisasi, pendidikan mengalami pergeseran dari fungsi dan status aslinya, terpaksa direduksi menjadi komoditas yang terikat pada logika pasar. Di satu sisi, pendidikan menjadi eksklusif dan sulit diakses oleh masyarakat berpendapatan rendah, yang mengakibatkan munculnya fenomena darwinisme sosial. Di sisi lain, visi dan misi pendidikan tidak lepas dari aspek ekonomi, dengan tujuan utama menyiapkan peserta didik sebagai *homo economicus*.

¹⁸ Hasan Syahrizal dan M. Syahran Jailani, "Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif," *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (31 Mei 2023): 13–23, <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.49>.

Sejalan dengan pemikiran Paulo Freire tentang tiga kesadaran yang muncul akibat adopsi tiga paradigma pendidikan, baik kesadaran magis maupun kesadaran naif sangat mengakar dalam masyarakat kita.¹⁹ Misalnya, budaya fatalisme, yang umum di kalangan masyarakat, terutama di Jawa, mencerminkan sikap nrimo ing pandum (menerima nasib) yang berkontribusi pada pengurangan semangat inisiatif, inovasi, dan kritisisme. Lebih parah lagi, kesadaran naif yang disebabkan oleh hegemoni paradigma liberal telah menjangkiti sebagian besar Masyarakat.

Dengan meningkatnya biaya pendidikan akibat komersialisasi, orientasi mahasiswa mengalami pergeseran. Idealismenya terancam erosi, terutama ketika ada tekanan untuk segera lulus, baik karena biaya maupun standar yang ditetapkan pasar. Akibatnya, perhatian mahasiswa terhadap isu-isu sosial dan lingkungan yang dihadapi masyarakat sering kali terabaikan. Setelah lulus, banyak yang tidak bekerja demi kepentingan masyarakat, melainkan terjebak dalam pragmatisme pasar, yang menghambat potensi mereka untuk berkontribusi pada transformasi sosial. Para ilmuwan menyatakan akibat pendidikan yang sangat liberal sering kali terjebak dalam posisi sebagai intelektual “asongan”, yang menjual pengetahuan mereka untuk riset atau pengembangan wacana yang sering kali didanai oleh pemilik modal. Situasi ini berkontribusi pada stagnasi ilmu sosial dan ketidakmampuan untuk menjadi bagian dari solusi bagi masalah masyarakat. Para ilmuwan sering kali terjebak dalam studi yang ditentukan oleh ideologi mainstream yang bertentangan dengan transformasi.

Pendidikan nasional memiliki peran yang sangat penting dalam proses transformasi sosial di Indonesia. Dalam konteks ini, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk mentransfer pengetahuan, tetapi juga sebagai alat untuk membentuk karakter dan nilai-nilai sosial yang diperlukan dalam masyarakat. Pendidikan yang berkualitas dapat meningkatkan

¹⁹

ADDIN	ZOTERO_ITEM	CSL_CITATION
{"citationID": "ap2N7ulT", "properties": {"formattedCitation": "Irma Rosyidah dan Mujib Ridlwan, \u2022{Konsep Pendidikan Humanistik Perspektif Ki Hajar Dewantara Dan Paulo Freire Dalam Kritik Pendidikan Di Masa Pandemi Covid-19,\u2022{} {\u2022{i{Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman}} 12, no. 1 (2022): 79\u2022{}\u2022{}88, https://doi.org/10.36835/hjsk.v12i01.3917.", "plainCitation": "Irma Rosyidah dan Mujib Ridlwan, \"Konsep Pendidikan Humanistik Perspektif Ki Hajar Dewantara Dan Paulo Freire Dalam Kritik Pendidikan Di Masa Pandemi Covid-19,\" Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman 12, no. 1 (2022): 79-88, https://doi.org/10.36835/hjsk.v12i01.3917.", "noteIndex": "16", "citationItems": [{"id": "164", "uris": ["http://zotero.org/users/local/Jq1y9ETG/items/QFCT55W7"]}], "itemData": {"id": "164", "type": "article-journal", "container-title": "Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman", "DOI": "https://doi.org/10.36835/hjsk.v12i01.3917", "ISSN": "2502-6100", "issue": "1", "page": "79-88", "title": "Konsep Pendidikan Humanistik Perspektif Ki Hajar Dewantara Dan Paulo Freire Dalam Kritik Pendidikan Di Masa Pandemi Covid-19", "volume": "12", "author": [{"family": "Rosyidah", "given": "Irma"}, {"family": "Ridlwan", "given": "Mujib"}], "issued": {"date-parts": [[2022]]]}}, "schema": "https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json"} Irma Rosyidah dan Mujib Ridlwan, “Konsep Pendidikan Humanistik Perspektif Ki Hajar Dewantara Dan Paulo Freire Dalam Kritik Pendidikan Di Masa Pandemi Covid-19,” <i>Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman</i> 12, no. 1 (2022): 79–88, https://doi.org/10.36835/hjsk.v12i01.3917 .		

kesadaran sosial dan mendorong individu untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat.²⁰ Dengan demikian, implementasi pendidikan nasional yang efektif dapat menjadi pendorong utama bagi perubahan sosial yang positif.

Implementasi pendidikan nasional adalah kebijakan yang inklusif dan berbasis budaya. Kurikulum yang relevan dengan konteks lokal dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan masyarakat dalam proses belajar mengajar. Ketika pendidikan disesuaikan dengan nilai-nilai dan budaya setempat, siswa akan lebih mudah memahami dan menginternalisasi materi yang diajarkan. Hal ini tidak hanya meningkatkan hasil belajar, tetapi juga memperkuat identitas budaya dan sosial masyarakat, yang pada gilirannya dapat mendorong transformasi sosial. Partisipasi masyarakat dalam pendidikan juga menjadi faktor kunci dalam proses transformasi sosial. Masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait pendidikan, mereka merasa memiliki tanggung jawab terhadap keberhasilan program pendidikan tersebut. Keterlibatan ini dapat berupa partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pendidikan. Dengan melibatkan masyarakat, pendidikan menjadi lebih relevan dan responsif terhadap kebutuhan lokal, sehingga dapat menciptakan dampak sosial yang lebih besar.

Pendidikan yang berkualitas dapat membantu mengatasi berbagai tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Dalam hal ini menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan yang baik dapat meningkatkan peluang kerja dan mengurangi kemiskinan. Ketika individu memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai, mereka lebih mampu berkontribusi pada perekonomian dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Dengan demikian, pendidikan berfungsi sebagai alat untuk memberdayakan individu dan masyarakat, yang pada akhirnya dapat mendorong transformasi sosial yang lebih luas.

Tantangan dalam implementasi pendidikan nasional tetap ada. Pernyataan di atas menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan dalam akses dan kualitas pendidikan di berbagai daerah, terutama di daerah terpencil dan kurang berkembang. Kesenjangan ini dapat menghambat proses transformasi sosial, karena tidak semua individu memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, perlu ada upaya yang lebih besar dari pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan bahwa pendidikan dapat diakses oleh semua lapisan Masyarakat.

²⁰ Furi Amelia Andini, Vina Aulia, dan Nur Areefa, "Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Meningkatkan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara," *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 5, no. 4 (2024): 71–80, <https://doi.org/10.3783/causa.v5i4.4222>.

Implementasi pendidikan nasional yang efektif dapat menjadi kunci untuk mendorong transformasi sosial di Indonesia. Dengan mengedepankan kebijakan yang inklusif, melibatkan masyarakat, dan memastikan akses yang merata terhadap pendidikan berkualitas, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Penelitian ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan tersebut, sehingga pendidikan dapat berfungsi sebagai motor penggerak perubahan sosial yang positif

Analisis Kebijakan Strategis Transformatif Pendidikan Madrasah dan Perguruan Tinggi Islam.

Persoalan yang mengemuka saat ini adalah seputar orientasi, arah pengembangan, dasar kebijakan dan seterusnya apakah hanya sekedar pemenuhan kebutuhan *ad hoc* bagi madrasah-madrasah yang membutuhkan guru bidang studi umum, ataukah dapat dimasukkan sebagai *core* bidang ilmu keislaman itu sendiri. Maka, dipandang penting, menggali adanya upaya mendasar dan strategis yang ditempuh oleh Madrasah sampai Perguruan Tinggi Islam dalam merekonstruksi paradigma yaitu:

1. Secara keseluruhan, lembaga pendidikan tinggi Islam, baik negeri maupun swasta, belum menjadi pilihan utama bagi orang tua dalam mendidik anak-anak mereka. Hal ini disebabkan oleh kurangnya fasilitas dan sarana pengembangan ilmu pengetahuan, minimnya kompetensi akademik dosen, serta faktor-faktor lain yang membuat lembaga pendidikan tinggi Islam hanya dipilih sebagai alternatif ketika tidak diterima di perguruan tinggi umum. Akibatnya, kualitas input di lembaga pendidikan tinggi Islam cenderung lebih rendah dibandingkan dengan perguruan tinggi umum.
2. Konsep kebijakan pendidikan mencakup aturan-aturan tertulis yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur pelaksanaan pendidikan agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Kebijakan pendidikan memiliki empat tingkatan, yaitu Kebijakan Nasional, Kebijakan Umum, Kebijakan Khusus, dan Kebijakan Teknis.
3. Secara umum, kebijakan pendidikan di Indonesia bersifat sentralistik dan desentralistik. Salah satu contoh kebijakan desentralistik adalah Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang memiliki empat dampak positif: 1) peningkatan mutu pendidikan, 2) efisiensi keuangan, 3) efisiensi administrasi, dan 4) pemerataan akses Pendidikan.
4. Kebijakan pendidikan di Indonesia ditetapkan untuk mendukung cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan hak warga negara yang tercantum dalam Pasal 31 UUD 1945.

5. Beberapa kebijakan yang diambil antara lain adalah program wajib belajar (PP No 47 Tahun 2008) dan penciptaan standar nasional pendidikan yang mencakup delapan standar, yaitu isi, lulusan, proses, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian.
6. Transformasi harus diarahkan ke hal-hal positif, dengan fokus pada peserta didik. Mereka perlu dibimbing, diarahkan, dibantu, difasilitasi, distimulasi, didorong, dan diberikan pengalaman agar mampu melakukan transformasi ke arah yang lebih baik, baik dalam hal kecerdasan, pengetahuan, wawasan, sikap, keterampilan, perilaku, dan akhlak.²¹ Oleh karena itu, manajer yang memiliki posisi strategis harus menggerakkan semua potensi guru, dosen, dan ustaz untuk mewujudkan transformasi pada siswa, mahasiswa, dan santri, yang mencakup.

Oleh karena itu manajer yang memiliki posisi strategis harus menggerakkan semua kekuatan guru, dosen, dan ustaz untuk mewujudkan transformasi pada siswa, mahasiswa, santri, yaitu antara lain:

1. Mengubah ketidakpahaman menjadi pemahaman
2. Meningkatkan daya serap dari lambat menjadi cepat
3. Memperluas wawasan dari sempit menjadi luas
4. Mengubah sikap pasif menjadi inisiatif dan kreatif
5. Mengalihkan gaya hidup konsumtif menjadi produktif
6. Mendorong kemandirian daripada ketergantungan pada orang lain
7. Mengubah sikap eksklusif menjadi inklusif
8. Mentransformasikan sikap fanatik menjadi toleran
9. Mengubah sikap malas menjadi rajin
10. Mengalihkan kebiasaan nakal menjadi taat
11. Meningkatkan rasa percaya diri dari kondisi minder
12. Mengubah perilaku indisipliner menjadi disiplin
13. Mengubah sikap sulit bergaul menjadi fleksibel
14. Meningkatkan keterampilan dari kondisi tidak terampil
15. Mengubah pemikiran yang kaku menjadi kritis.

Memberikan pemahaman dan meningkatkan kualitas dosen, guru, dan ustaz dalam mengajarkan nilai-nilai agama pada mata kuliah yang mereka ampu sangatlah penting. Mata

²¹ M Yusuf Aminuddin, "Model Kepemimpinan Transformatif (Kajian Kepemimpinan Transformatif di Lembaga Pendidikan Islam)," *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, 7, no. 2 (2017): 14–33, <https://doi.org/10.36835/hjsk.v7i2.3280>.

kuliah umum yang dimaksud mencakup semua disiplin ilmu, termasuk sains, sosial, dan humaniora. Dengan demikian, para dosen di bidang mata kuliah umum diharapkan dapat menerapkan dan menyampaikan materi yang mengandung nilai-nilai Islam. Pemerintah perlu menyusun kurikulum dan materi kuliah umum yang mencakup nilai-nilai agama universal dalam semua mata pelajaran ilmu pengetahuan umum. Nilai-nilai tersebut haruslah nilai-nilai Islam yang dapat disepakati oleh seluruh umat Islam, dan tidak mencakup aspek ibadah atau muamalah yang dapat menimbulkan perbedaan pendapat, karena ibadah adalah ranah privat antara individu dan Tuhan. Jika ketiga usulan ini dapat diterapkan, meskipun memerlukan waktu yang cukup lama, penulis yakin bahwa nilai-nilai agama akan terintegrasi dan menjadi dasar bagi semua ilmu umum yang ada. Selain itu, konsep ini diharapkan dapat menghasilkan alumni yang memiliki etika dan moral yang kuat dalam menerapkan ilmunya demi kesejahteraan bersama. Jika hal ini terwujud, cita-cita untuk melahirkan lulusan perguruan tinggi yang merupakan ulama berpengetahuan dan intelektual yang berakhlaq mulia akan semakin mendekati kenyataan.

Implementasi Dimensi Kebijakan Strategis Transformatif Pendidikan Madrasah dan Perguruan Tinggi Islam.

Penelitian ini bertujuan menganalisis dimensi kebijakan strategis yang bersifat transformatif dalam pendidikan madrasah dan perguruan tinggi Islam, dengan fokus pada kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Islam. Berikut hasil kebijakan strategis pendidikan madrasah dan perguruan tinggi Islam:

1. Konteks Kebijakan

Kebijakan pendidikan madrasah dan perguruan tinggi Islam perlu dipahami dalam konteks sosial, budaya, dan politik yang lebih luas. Kebijakan ini harus mampu menjawab tantangan zaman, termasuk globalisasi dan perkembangan teknologi, serta kebutuhan masyarakat akan pendidikan yang berkualitas.

2. Paradigma Pendidikan

Terdapat kebutuhan mendasar untuk merekonstruksi paradigma pendidikan yang ada, dari yang bersifat konvensional menjadi lebih transformatif. Ini mencakup pengembangan kurikulum yang relevan, peningkatan kualitas pengajaran, dan integrasi nilai-nilai Islam dalam semua aspek pendidikan

3. Kualitas Sumber Daya Manusia

Penelitian menunjukkan bahwa kualitas dosen dan tenaga pengajar di madrasah dan perguruan tinggi Islam masih perlu ditingkatkan. Kebijakan yang mendukung

pengembangan profesionalisme guru dan dosen sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif.

4. Partisipasi Stakeholder

Kebijakan pendidikan yang transformatif harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan. Partisipasi aktif dari semua pihak akan memperkuat implementasi kebijakan dan meningkatkan akuntabilitas.

5. Inovasi dan Kreativitas

Kebijakan pendidikan harus mendorong inovasi dan kreativitas di kalangan siswa dan mahasiswa. Ini dapat dilakukan melalui pengembangan program-program yang mendukung pembelajaran aktif, kolaboratif, dan berbasis proyek.

6. Pendidikan Berbasis Nilai

Penelitian ini menekankan pentingnya pendidikan yang tidak hanya fokus pada aspek akademis, tetapi juga pada pengembangan karakter dan nilai-nilai moral. Pendidikan harus mampu membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas dan etika yang tinggi.

7. Evaluasi dan Monitoring

Kebijakan pendidikan perlu dilengkapi dengan sistem evaluasi dan monitoring yang efektif untuk memastikan bahwa tujuan pendidikan tercapai. Ini termasuk pengukuran hasil belajar yang komprehensif dan umpan balik yang konstruktif.

8. Kebijakan Desentralisasi

Penelitian menemukan bahwa desentralisasi dalam kebijakan pendidikan memberikan peluang bagi madrasah dan perguruan tinggi Islam untuk beradaptasi dengan kebutuhan lokal. Namun, perlu ada panduan dan dukungan dari pemerintah pusat untuk memastikan kualitas pendidikan tetap terjaga.

9. Akses dan Kesetaraan

Kebijakan pendidikan harus memastikan akses yang adil dan setara bagi semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok yang terpinggirkan. Ini penting untuk menciptakan kesempatan yang sama dalam mendapatkan pendidikan berkualitas.

10. Sustainabilitas

Kebijakan pendidikan yang transformatif harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan, baik dari segi finansial maupun sosial. Ini mencakup pengembangan model pembiayaan yang inovatif dan dukungan terhadap program-program yang berkelanjutan.

SIMPULAN

Implementasi pendidikan nasional yang transformatif di Indonesia, khususnya dalam konteks madrasah dan perguruan tinggi Islam, memerlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi. Pendidikan tidak hanya harus berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana untuk membentuk karakter dan nilai-nilai moral yang kuat pada generasi muda. Dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perubahan sosial, penting bagi kebijakan pendidikan untuk beradaptasi dan menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Kebijakan yang bersifat transformatif harus melibatkan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan, untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan inovatif. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik dosen maupun siswa, harus menjadi prioritas utama agar pendidikan dapat menghasilkan individu yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki integritas dan etika yang tinggi.

Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam semua aspek pendidikan dan memastikan akses yang adil bagi semua lapisan masyarakat, kita dapat berharap bahwa pendidikan di Indonesia akan mampu menciptakan lulusan yang tidak hanya berpengetahuan, tetapi juga berkontribusi positif terhadap masyarakat. Melalui upaya bersama dan komitmen yang kuat, cita-cita untuk mewujudkan pendidikan yang kritis, kreatif, dan transformatif dapat tercapai, sehingga membawa perubahan sosial yang signifikan dan berkelanjutan bagi bangsa.

DAFTAR RUJUKAN

- Aliyah, Himatul. "Implementasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto Kementerian Agama Kota Kediri." *REVITALISASI* 11, no. 2 (31 Desember 2022): 182. <https://doi.org/10.32503/revitalisasi.v11i2.3198>.
- Aminuddin, M Yusuf. "Model Kepemimpinan Transformatif (Kajian Kepemimpinan Transformatif di Lembaga Pendidikan Islam)." *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, 7, no. 2 (2017): 14–33. <https://doi.org/10.36835/hjsk.v7i2.3280>.
- Andini, Furi Amelia, Vina Aulia, dan Nur Areefa. "Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Meningkatkan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara." *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 5, no. 4 (2024): 71–80. <https://doi.org/10.3783/causa.v5i4.4222>.
- Bakry, Aminuddin. "Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik." *Jurnal Medtek* 2, no. 1 (2010).
- Barnoto. "Implementasi Kebijakan Program Akselerasi di Madrasah Aliyah Unggulan Amanatul Ummah Pacet Mojokerto." *JOIES (Journal of Islamic Education Studies* 1, no. 2 (2016). <https://doi.org/10.15642/joies.2016.1.2.221-246>.
- Dalimunthe, Dewi Shara. "Transformasi Pendidikan Agama Islam: Memperkuat Nilai-nilai Spiritual, Etika, dan Pemahaman Keislaman dalam Konteks Modern." *Al-Murabbi: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 1 (14 Juni 2023): 75–96. <https://doi.org/10.62086/al-murabbi.v1i1.426>.
- Dewi, Suci Zakiah, dan H Tatang Ibrahim. "Pentingnya Pemahaman Konsep Untuk Mengatasi Miskonsepsi Dalam Materi Belajar IPA di Sekolah Dasar." *Jurnal Pendidikan UNIGA* 13, no. 01 (2019): 130-136. <https://doi.org/10.52434/jp.v13i1.823>.
- Fatimah, Siti, dan Irma Rosyidah. "Implementasi Supervisi Akademik Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidik Di MTs SA Miftahul Hikmah Parengan Tuban." *SCAFFOLDING: Jurnal Pendidikan Islam dan Multikulturalisme* 3, no. 1 (29 Juni 2021): 66–75. <https://doi.org/10.37680/scaffolding.v3i1.872>.
- Fika, Nurul, Anis Fauzi, dan Ahmad Qurtubi. "Analisis Kebijakan Versi William Dunn dalam Pondok Pesantren Modern." *Journal on Education* 05, no. 04 (2023). <https://www.jonedu.org/index.php/joe/article/view/2861>.
- Indiahono, Dwiyanto. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media, 2009.
- Lengkana, Anggi Setia, dan N. Siti Nuraeni Sofa. "Kebijakan Pendidikan Jasmani dalam Pendidikan." *Jurnal Olahraga* 3, no. 1 (30 April 2017): 1–12. <https://doi.org/10.37742/jo.v3i1.67>.

- Mashudi, Ahmad. "Kebijakan PPDB Sistem Zonasi SMA/SMK dalam mendorong Pemerataan Kualitas Sumberdaya Manusia di Jawa Timur." *Nidhomul Haq : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4, no. 2 (5 Oktober 2019): 186–206. <https://doi.org/10.31538/ndh.v4i2.327>.
- Ma'sum, Toha. "Strategi Transformatif Membangun Pendidikan Berkualitas Berbasis Pesantren." *Jurnal El-Barqie: Jurnal MA Darussalam* 1, no. 1 (2020): 1–20.
- Munawar, Haris. "Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Agama Islam terhadap Koordinasi Penyuluhan dengan Pengawas Pendidikan Agama Islam untuk Mewujudkan Efektivitas Program Pendidikan Agama Islam." *Jurnal Pendidikan UNIGA* 11, no. 01 (2017). <https://doi.org/10.52434/jp.v11i1.25>.
- Ninik Hidayati dan Dian Rustyawati. "Kepala Sekolah sebagai Penentu Kebijakan Pendidikan Di Sekolah Dasar." *PREMIERE : Journal of Islamic Elementary Education* 1, no. 2 (25 Juni 2020): 91–103. <https://doi.org/10.51675/jp.v1i2.82>.
- Pare, Alprianti, dan Hotmaulina Sihotang. "Pendidikan Holistik untuk Mengembangkan Keterampilan Abad 21 dalam Menghadapi Tantangan Era Digital." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (2023).
- Rokim. "Analisis Kebijakan Versi Dunn & Implementasinya Dalam Pendidikan Islam." *PANCAWAHANA: Jurnal Studi Islam* 14, no. 2 (2019): 60–69.
- Rozak, Abdul. "Kebijakan Pendidikan Di Indonesia." *Alim | Journal of Islamic Education* 3, no. 2 (23 Juni 2021): 197208. <https://doi.org/10.51275/alim.v3i2.218>.
- Syahrizal, Hasan, dan M. Syahran Jailani. "Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif." *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (31 Mei 2023): 13–23. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.49>.
- Ula, H., Suwarno, Suradji, M., & Mukhlis M. (2024). Manajemen Program Pendidikan Karakter Dalam Meningkatkan Sikap Sosial Siswa Di Era Disrupsi Informasi. *Ta'lîm : Jurnal Studi Pendidikan Islam*, 7(2), 349-362.